

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan	xiv
Daftar Tabel	xviii
Intisari.....	xx
<i>Abstract</i>	xx
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
F.1. Jenis Penelitian.....	16
F.2. Pendekatan Penelitian.....	18
F.3. Jenis Data.....	20

	F.4. Cara Pengumpulan Data.....	22
	F.5. Analisis Data.....	23
	F.6. Jalannya Penelitian dan Hambatan Penelitian.....	24
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	28
	A. Tinjauan Pustaka.....	28
	A.1. Kepatuhan Negara terhadap Instrumen HAM.....	29
	A.2. Hak atas Pendidikan sebagai HAM Fundamental.....	31
	A.3. Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah.....	36
	A.4. Fungsi dan Kewenangan Hukum.....	42
	A.5. Hakikat Hukum Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah.....	51
	B. Landasan Teori Hukum.....	53
	B.1. Teori Keadilan Hukum.....	55
	B.2. Teori Kedaulatan Negara Sebagai Sebuah “Kompetensi dan Relasi Fungsional Negara”.....	65
	B.3. Teori Perlindungan HAM Sebagai Agenda Global....	69
BAB III	KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN <i>THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS</i>.....	81
	A. Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Ketentuan ICESCR.....	84

ICESCR.....	97
C. Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR.....	108
D. Indikator Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Dan Menengah.....	113
E. Pelaksanaan ICESCR oleh Indonesia dari Tahun 2005-2017.....	120
F. Institusi dan Kebijakan yang Relevan dengan ICESCR di Indonesia.....	124
BAB IV PELAKSANAAN KESESUAIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR.....	135
A. Pendidikan Dasar dan Menengah di Kawasan Perbatasan..	136
B. Wilayah Perbatasan Negara Sebagai Daerah Tak Berkeinginan Sekolah	159
C. Dasar Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan	170
D. Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan	174
E. Program Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan	189
F. Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah.....	196



PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN.....	201
A. Kawasan Perbatasan Negara.....	204
B. Relevansi dan Implementasi Regulasi Nasional dan Daerah.....	212
C. Peran Negara Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah.....	239
D. Peran Masyarakat dan Entitas Bukan Negara.....	253
 BAB VI	
TANTANGAN DAN KESEMPATAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....	265
A. Peningkatan Akses Pendidikan.....	270
B. Penyediaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.....	294
C. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pemenuhan Pendidikan Dasar dan Menengah	302
D. Prospek, Kesempatan Peluang, dan Tantangan.....	321
E. Pelaporan ke Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya..	327
 BAB VII	
PENUTUP.....	333
A. Kesimpulan.....	333
B. Saran dan Rekomendasi.....	341



Daftar Pustaka

Universitas Gadjah Mada, 2018. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>..... **346**

A. Buku	346
B. Dokumen Hukum.....	353
C. FGD.....	359
D. Jurnal Ilmiah	354
E. Internet	355
F. Makalah dan Paper	357
G. Thesis/Disertasi/Laporan Penelitian.....	360
H. Wawancara dan FGD	361

Lampiran 1 **Daftar Pertanyaan.....** **363**

Daftar Pertanyaan	a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar...	363
	b. Wahana Visi Indonesia.....	364
	c. Kepala Biro Hukum Kemdiknas.....	365

Lampiran 2 Gambar dan Foto Kondisi Sekolah di Kawasan
Perbatasan..... 366